

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berfungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan dan tugas-tugas lain yang diberikan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Peradilan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan peradilan serta petunjuk JUKLAK/JUKNIS Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menyelenggarakan proses berperkara dengan memeriksa, memutus serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Dengan berprinsip menyelenggarakan proses perkara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menjunjung tinggi azas keadilan dan kebersamaan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009 adalah

“Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung”

Visi Badan Peradilan tersebut diatas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama pada alinea kedua dan alinea keempat sebagai tujuan negara Republik Indonesia.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ***Mewujudkan Supremasi Hukum Melalui Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri, Efektif, Efesien Serta Mendapatkan Kepercayaan Publik, Profesional, Dan Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkualitas, Etis, Terjangkau, Dan Biaya Rendah Bagi Masyarakat Serta Menjawab Panggilan Pelayanan Publik.*** Yang bertujuan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

2. Misi

Berdasarkan Visi tersebut diatas, Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah :

- 1. Memperbaiki Akses Pelayanan Dibidang Peradilan Kepada Masyarakat.***
- 2. Memperbaiki Kualitas Mewujudkan Rasa Keadilan Sesuai Dengan Undang-Undang Dan Peraturan Serta Keadilan Masyarakat.***
- 3. Mewujudkan Peradilan Yang Mandiri Dan Independen Tanpa Campur Tangan Pihak Lain.***
- 4. Input Internal Pada Peradilan.***
- 5. Mewujudkan Institusi Peradilan Yang Efektif, Efesien, Bermartabat Dan Dihormati.***
- 6. Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri Tidak Memihak Dan Transparan.***

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. **Menjaga kemandirian lembaga peradilan** maksudnya adalah bahwa syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian lembaga peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan yang efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana lembaga peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan financial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi dan financial seluruh lembaga peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian institusional, kemandirian lembaga peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.
2. **Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan** maksudnya adalah Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap lembaga peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

- 3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Lembaga Peradilan** maksudnya adalah kualitas kepemimpinan lembaga peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan lembaga peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan lembaga peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non teknis, secara operasional, pimpinan lembaga peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan lembaga peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan lembaga peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. **Meningkatkan kredibilitas dan transparansi lembaga peradilan** maksudnya adalah kredibilitas dan transparansi lembaga peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada lembaga peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam lembaga peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan atau hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

C. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan visi dan misi diatas, dikembangkanlah rencana strategis dalam bentuk nilai-nilai utama badan peradilan. Nilai-nilai yang menjadi dasar perilaku (budaya) seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visi misinya. Nilai-nilai yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)
 - a. Kemandirian Institusional

Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

b. Kemandirian fungsional

Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

2. Kemandirian Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparatur peradilan

3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

4. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

5. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

6. Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparat peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.

7. Perlakuan Yang Sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

BAB II

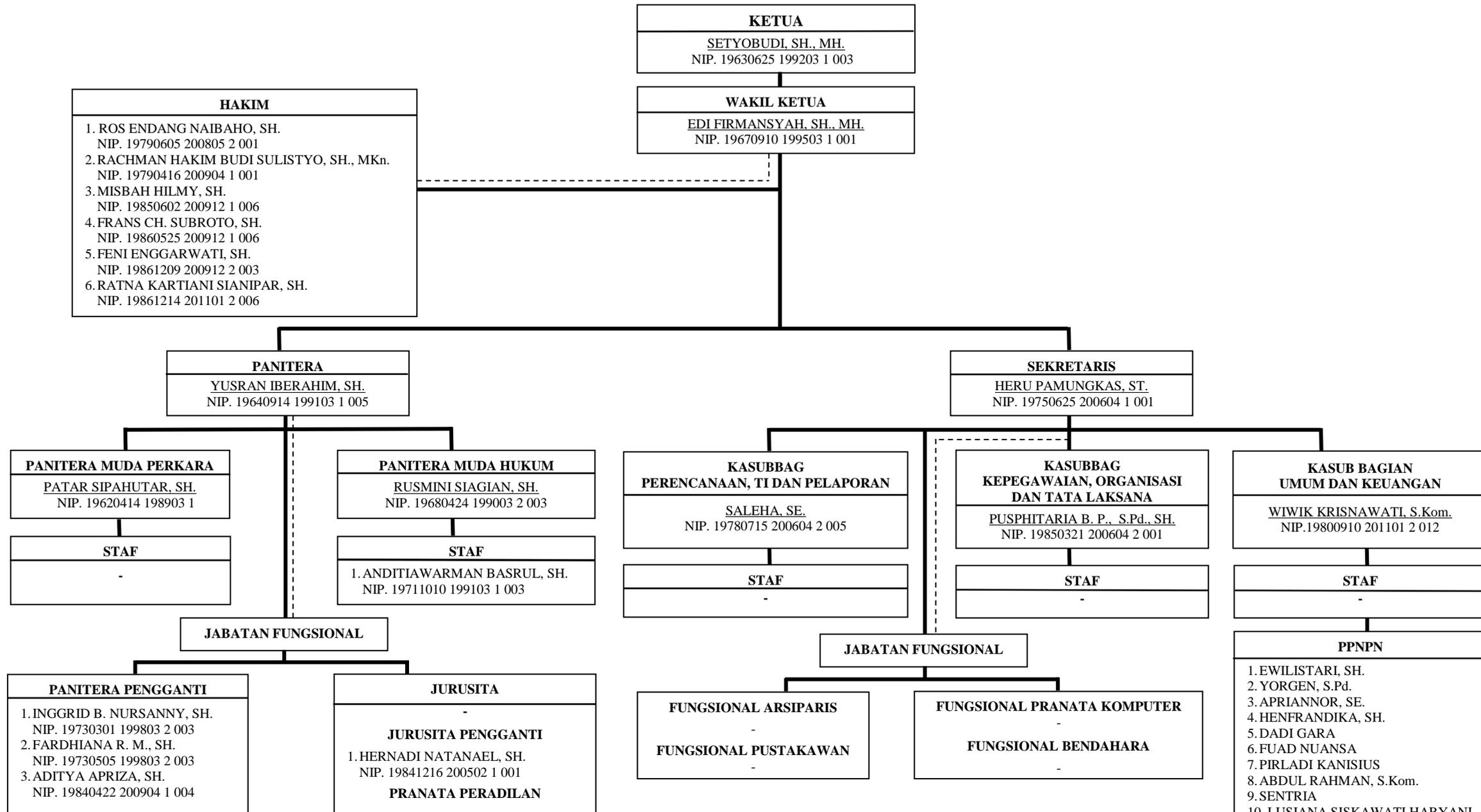
STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mempunyai struktur organisasi yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Keppres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
5. Keppres Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kesekretariatan MA RI;
6. Keppres Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan MA RI;
7. Keputusan Ketua MA RI Nomor : KMA/018/SK/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan MA RI;
8. Keputusan Sekretaris MA RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan MA RI;
9. Peraturan MA RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan.

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
BERDASARKAN PERMA Nomor 7 TAHUN 2015**



STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/21/M.Pan/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) Administrasi Pemerintahan bahwa SOP adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Tujuan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) diantaranya sebagai berikut :

- Agar mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai;
- Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pegawai terkait;
- Melindungi pegawai dari kesalahan administrasi lainnya;
- Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dari inefisiensi.

Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah menyusun Standar Operasional Prosedur sebagai acuan untuk bertindak, agar akuntabilitas kinerja dapat dievaluasi dan terukur.

Berikut Matrik SOP Kepaniteraan dan Kesekretiatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya :

**MATRIK STANDART OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		TERDIRI DARI/SOP	KETERANGAN
I.	KEPANITERAAN				
1	KEPANITERAAN PERKARA	34	1	SOP/001/PRK/2018 TENTANG PENERIMAAN GUGATAN	
			2	SOP/002/PRK/2018 TENTANG PENDAFTARAN GUGATAN	
			3	SOP/003/PRK/2018 TENTANG PENANGANAN REGISTER PERKARA	
			4	SOP/004/PRK/2018 TENTANG PEMBERITAHUAN PUTUSAN PERKARA	
			5	SOP/005/PRK/2018 TENTANG PENERIMAAN PERKARA PERMOHONAN	
			6	SOP/006/PRK/2018 TENTANG PENDAFTARAN PERKARA PERMOHONAN	
			7	SOP/007/PRK/2018 TENTANG PENANGANAN REGISTER PERKARA PERMOHONAN	
			8	SOP/008/PRK/2018 TENTANG LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA	
			9	SOP/009/PRK/2018 TENTANG PENERIMAAN PERKARA BANDING	
			10	SOP/010/PRK/2018 TENTANG PENDAFTARAN PERKARA BANDING	
			11	SOP/011/PRK/2018 TENTANG PENERIMAAN MEMORI BANDING/KONTRA MEMORI BANDING	
			12	SOP/011/PRK/2018 TENTANG PENCABUTAN PERKARA BANDING	

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	TERDIRI DARI/SOP	KETERANGAN
	KEPANITERAAN PERKARA		13 SOP/013/PRK/2018 TENTANG PENGIRIMAN BERKAS PERKARA BANDING	
			14 SOP/014/PRK/2018 TENTANG PENERIMAAN PERKARA KASASI	
			15 SOP/015/PRK/2018 TENTANG PENDAFTARAN PERKARA KASASI	
			16 SOP/016/PRK/2018 TENTANG PENERIMAAN MEMORI KASASI/KONTRA MEMORI KASASI PERKARA KASASI	
			17 SOP/017/PRK/2018 TENTANG PENCABUTAN PERKARA KASASI	
			18 SOP/018/PRK/2018 TENTANG PENGIRIMAN BERKAS PERKARA KASASI	
			19 SOP/019/PRK/2018 TENTANG PENERIMAAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI	
			20 SOP/020/PRK/2018 TENTANG PENDAFTARAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI	
			21 SOP/021/PRK//2018 TENTANG PENERIMAAN MEMORI PK/KONTRA MEMORI PK PERKARA PENINJAUAN KEMBALI	
			22 SOP/022/PRK/2018 TENTANG PENCABUTAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI	
			23 SOP/023/PRK/2018 TENTANG PENGIRIMAN BERKAS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI	
			24 SOP/024/PRK/2018 TENTANG PEMBEITAHUAN PUTUSAN PERKARA BANDING/KASASI/PK	
			25 SOP/025/PRK/2018 TENTANG PENGELOLAAN SURAT MASUK KEPANITERAAN PERKARA	
			26 SOP/026/PRK/2018 TENTANG PENGELOLAAN SURAT KELUAR KEPANITERAAN PERKARA	
		27 SOP/027/PRK/2018 TENTANG PENERIMAAN PERM OHONAN EKSEKUSI		

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	TERDIRI DARI/SOP	KETERANGAN
	KEPANITERAAN PERKARA		28 SOP/028/PRK/2018 TENTANG PENDAFTARAN PERMOHONAN EKSEKUSI	
			29 SOP/029/PRK/2018 TENTANG PENETAPAN EKSEKUSI	
			30 SOP/030/PRK/2018 TENTANG PENANGANAN REGISTER GUGATAN/BANDING/KASASI/PK	
			31 SOP/031/PRK/2018 TENTANG PENGELOLAAN ARSIP BERKAS PERKARA KEPANITERAAN PERKARA	
			32 SOP/032/PRK/2018 TENTANG PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN GUGATAN KIP	
			33 SOP/033/PRK/2018 TENTANG PENGEMBALIAN SISA PANJAR	
			34 SOP/034/PRK/2018 TENTANG PENGELOLAAN PUBLIKASI INFORMASI PERKARA	

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		TERDIRI DARI/SOP	KETERANGAN
2	KEPANITERAAN HUKUM	15	1	SOP/001/HK/2018 TENTANG PENGELOLAAN SURAT MASUK	
			2	SOP/002/HK/2018 TENTANG PENGELOLAAN SURAT KELUAR	
			3	SOP/003/HK/2018 TENTANG PELAKSANAAN LAPORAN BULANAN	
			4	SOP/004/HK/2018 TENTANG PELAKSANAAN LAPORAN TRIWULAN	
			5	SOP/005/HK/2018 TENTANG PELAKSANAAN PEMBUATAN LAPORAN CATURWULAN	
			6	SOP/006/HK/2018 TENTANG PENGELOLAAN PEMBUATAN LAPORAN SEMESTER	
			7	SOP/007/HK/2018 TENTANG PELAKSANAAN PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN	
			8	SOP/008/HK/2018 TENTANG PELAKSANAAN PENANGANAN MEJA PENGADUAN	
			9	SOP/009/HK/2018 TENTANG PENGELOLAAN MEJA INFORMASI	
			10	SOP/010/HK/2018 TENTANG PENGELOLAAN BERKAS INAKTIF	
			11	SOP/011/HK/2018 TENTANG PENGELOLAAN SURAT KUASA KHUSUS/INSIDENTIL	
			12	SOP/012/HK/2018 TENTANG PELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN	
			13	SOP/013/HK/2018 TENTANG PERMOHONAN KUASA INSIDENTIL	
			14	SOP/014/HK/2018 TENTANG KUISIONER PENGADILAN TATA USAHA NEGARA	
			15	SOP/015/HK/2018 TENTANG PELAKSANAAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)	

**MATRIK STANDART OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		TERDIRI DARI/SOP	KETERANGAN
II	KESEKRETARIATAN				
1	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN				
	BAGIAN UMUM	11	1	SOP/001/UM/2018 TENTANG SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK	
			2	SOP/002/UM/2018 TENTANG SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR	
			3	SOP/003/UM/2018 TENTANG SOP PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	
			4	SOP/004/UM/2018 TENTANG SOP PENGINPUTAN DATA PADA APLIKASI PERSEDIAAN DAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN	
			5	SOP/005/UM/2018 TENTANG SOP KEAMANAN DAN KEBERSIHAN KANTOR	
			6	SOP/006/UM/2018 TENTANG SOP PEMELIHARAAN, PERBAIKAN BARANG MILIK NEGARA/INVENTARIS KANTOR	
			7	SOP/007/UM/2018 TENTANG SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN	
			8	SOP/008/UM/2018 TENTANG SOP PENGADAN BARANG DAN JASA ≤ Rp. 200.000.000,- dan ≥ Rp. 200.000.000,-	
			9	SOP/009/UM/2018 TENTANG SOP PELAKSANAAN HUBUNGAN MASAYARAKAT (HUMAS)	
			10	SOP/010/UM/2018 TENTANG SOP PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	
			11	SOP/011/UM/2018 TENTANG PELAPORAN APLIKASI SIMAK BMN PER SEMESTER/PERTAHUN TINGKAT KORWIL	

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		TERDIRI DARI/SOP	KETERANGAN
1	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN				
	BAGIAN KEUANGAN	11	1	SOP/001/KU/2018 TENTANG SOP PENGELOLAAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN DAN KEKURANGAN GAJI	
			2	SOP/002/KU/2018 TENTANG SOP PEMBAYARAN UANG MAKAN HAKIM DAN PEGAWAI	
			3	SOP/003/KU/2018 TENTANG SOP PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REMUNERASI	
			4	SOP/004/KU/2018 TENTANG SOP PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP)	
			5	SOP/005/KU/2018 TENTANG SOP PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)	
			6	SOP/006/KU/2018 TENTANG SOP PEMBAYARAN LS PIHAK KETIGA	
			7	SOP/007/KU/2018 TENTANG SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)	
			8	SOP/008/KU/2018 TENTANG SOP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA	
			9	SOP/009/KU/2018 TENTANG SOP LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN	
			10	SOP/010/KU/2018 TENTANG SOP PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)	
			11	SOP/011/KU/2018 TENTANG SOP PENGELOLAAN SAIBA WILAYAH DAN CALK WILAYAH	

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		TERDIRI DARI/SOP	KETERANGAN
2	BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	10	1	SOP/001/KP/2018 TENTANG SOP PENGIRIMAN DAFTAR NOMINATIF RENCANA KENAIKAN PANGKAT	
			2	SOP/002/KP/2018 TENTANG SOP BERKAS USUL KENAIKAN PANGKAT	
			3	SOP/003/KP/2018 TENTANG SOP BERKAS USUL PROMOSI JABATAN	
			5	SOP/005/KP/2018 TENTANG SOP PENYELESAIAN PERMOHONAN CUTI	
			6	SOP/006/KP/2018 TENTANG SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA	
			7	SOP/007/KP/2018 TENTANG SOP BEZETTING	
			8	SOP/008/KP/2018 TENTANG SOP REKAPITULASI DAFTAR HADIR HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	
			9	SOP/009/KP/2018 TENTANG SOP PENYELESAIAN SURAT DINAS /SURAT TUGAS	
			10	SOP/010/KP/2018 TENTANG SOP PENYELESAIAN SURAT KELUAR (SURAT KP4, SURAT KETERANGAN DLL)	

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		TERDIRI DARI/SOP	KETERANGAN
3	BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN	13	1	SOP/001/PTIP/2018 TENTANG SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-KL)	
			2	SOP/002/PTIP//2018 TENTANG SOP PEMBAHARUAN DATA DAN INFORMASI DALAM WEBSITE	
			3	SOP/003/PTIP/2018 TENTANG SOP DOKUMENTASI DATA DAN INFORMASI	
			4	SOP/004/PTIP/2018 TENTANG SOP PENGELOLAAN SERVER DAN APLIKASI	
			5	SOP/005/PTIP/2018 TENTANG SOP PENGELOLAAN JARINGAN	
			6	SOP/006/PTIP/2018 TENTANG SOP PENGELOLAAN DAN SINKRONISASI DATABASE	
			7	SOP/007/PTIP/2018 TENTANG SOP PENGELOLAAN PUBLIKASI INFORMASI PERKARA	
			8	SOP/008/PTIP/2018 TENTANG SOP TRAINER PELAKSANAAN SIPP	
			9	SOP/009/PTIP/2018 TENTANG SOP LAPORAN KEGIATAN BULANAN	
			10	SOP/010/PTIP/2018 TENTANG SOP LAPORAN TAHUNAN	
			11	SOP/011/PTIP/2018 TENTANG SOP RENCANA UMUM PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS NEGARA	
			12	SOP/012/PTIP/2018 TENTANG SOP RENCANA KERJA TAHUNAN	
			13	SOP/013/PTIP/2018 TENTANG SOP PELAPORAN E-MONEV BAPPPENAS PER-TRIWULAN	

SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2018 antara lain :

1. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kepaniteraan (*terlampir*):
 - Panitera (eselon III.a)
 - Panitera Muda Perkara (eselon IV.a)
 - Panitera Muda Hukum (eselon IV.a)
 - Panitera Pengganti
 - Juru Sita Pengganti (*baru dilantik pada bulan Desember 2018*)

2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kesekretariatan (*terlampir*) :
 - Sekretaris (eselon III.a)
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan (eselon IV.a)
 - Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (eselon IV.a)
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan (eselon IV.a)
 - Staf

SASARAN KINERJA KEPANITERAAN

NO	SASARAN KINERJA PEGAWAI	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2018	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PANITERA	23	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Sasaran Kinerja 2. Menerima dan menandatangani permohonan Banding, Kasasi, PK dan Memori/Kontra Memori (Banding, Kasasi, PK) 3. Menandatangani pemberitahuan putusan banding, kasasi, PK 4. Mengoreksi putusan banding, kasasi dan PK 5. Memonitor pengisian register perkara 6. Mengkoreksi berkas kelengkapan surat gugatan 7. Mengawasi pelaksanaan upload putusan perkara Tk. I ke Direktori Putusan 8. Mengawasi pelaksanaan pemasukan data ke SIPP 9. Mengkoreksi laporan bulanan 10. Mengkoreksi laporan empat bulanan 11. Mengkoreksi laporan enam bulanan 12. Mengkoreksi laporan tahunan perkara 13. Melakukan pengawasan melekat kepaniteraan perkara dan hukum 14. Membantu Hakim dalam persdiangan

			<ol style="list-style-type: none"> 15. Membuat Berita Acara Sidang 16. Membuat jadwal sidang di website 17. Membuat surat panggilan sidang 18. Membuat surat pemberitahuan putusan apabila ada pihak yang tidak hadir 19. Menandatangani putusan 20. Membuat salinan putusan kepada pihak-pihak 21. Menunjuk PP untuk menangani perkara apabila panitera berhalangan 22. Melaksanakan pengisian SIPP pada setiap persidangan 23. Minutasi berkas perkara
2	PANITERA MUDA PERKARA	27	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara TUN 2. Memberi nomor register perkara 3. Menyiapkan berkas perkara Banding 4. Menyiapkan berkas perkara Kasasi 5. Menyiapkan berkas perkara Peninjauan Kembali 6. Menyiapkan berkas perkara eksekusi 7. Mengirim berkas banding 8. Mengirim berkas kasasi 9. Mengirim berkas PK 10. Memberitahukan putusan banding kepada para pihak 11. Memberitahukan putusan Kasasi kepada

			<p>para pihak</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Menyerahkan arsip perkara kepada Panmud Hukum 13. Menerima minutasi berkas perkara dari PP 14. Mengkoordinir tugas-tugas staf Kepaniteraan Perkara 15. Mengetik/menerima bekas perkara 16. Mengetik /membuat Berita Acara Pemeriksaan Persiapan 17. Mengetik/membuat berita acara persidangan 18. Mengetik/membuat surat panggilan para pihak 19. Mengetik/membuat putusan sela 20. Mengetik/membuat draf putusan 21. Memperbaiki pengetikan putusan setelah dikoreksi hakim 22. Menggandakan salinan putusan dalam bentuk hardcopy dan soft copy 23. Melaporkan kepada panitera, perkara yang telah selesai 24. Menyerahkan minutasi berkas kepada panmud perkara 25. Melaksanakan SIPP setiap perkara dan persidangan 26. Melaksanakan SIPP sebagai PP 27. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan
3	PANITERA MUDA HUKUM	11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat laporan bulanan perkara 2. Membuat laporan kwartal (empat bulanan) mengenai laporan perkara yang

			<p>dimohonkan Banding, Kasasi, PK dan Eksekusi</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Membuat laporan semester tentang kegiatan hakim dan Panitera/PP 4. Meyusun laporan tahunan perkara 5. Membuat statistik atau dokumentasi 6. Menyimpan berkas perkara yang sudah inkraucht dengan mencatat didalam buku 7. Melaksanakan laporan penanganan pengaduan 8. Melaksanakan pelayanan meja informasi 9. Melakukan pengawasan melekat dilingkungan kepaniteraan hukum 10. Melaksanakan pendaftaran surat kuasa 11. Melaksanakan tugas-tugas sebagai PP
4	PANITERA PENGANTI	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Sasaran Kinerja Pegawai 2. Membuat panggilan pemeriksaan persiapan 3. Membuat panggilan pemeriksaan persidangan 4. Mengikuti dan mencatat jalannya persidangan 5. Membuat Berita Acara 6. Mengetik putusan 7. Mengetik putusan sela 8. Mengetik penetapan pencabutan 9. Memberitahukan isi putusan 10. Penggandaan putusan 11. Mengirim salinan putusan 12. Memeriksa berkas sebelum diserahkan kepada kepaniteraan perkara

SASARAN KINERJA KESEKRETARIATAN

NO	SASARAN KINERJA PEGAWAI	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2018	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SEKRETARIS	7	<p>1. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di kesekretariatan</p> <p style="text-align: center;">Subbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinir penyusunan laporan absensi hakim dan pegawai setiap bulan - Mengkoordinir penyusunan bezetting, DUK dan DUS - Meneliti, mengoreksi dan memaraf usulan kenaikan pangkat, KGB, usulan diklat, usulan jabatan dan mutasi - Meneliti, mengoreksi dan memaraf surat pernyataan menduduki jabatan, Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Jabatan, surat pernyataan pelantikan, KP4, Surat tugas kedinasan, surat pelaksana tugas/harian - Meneliti dan memaraf surat keputusan internal kantor - Mendisposisi surat masuk/keluar

			<p>disubbag kepegawaian, organisasi dan tata laksana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menilai SKP Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan menandatangani SKP para staf
		10	<p>Subbag Umum dan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi kebutuhan operasional dan non operasional kantor - Meneliti, memaraf serta menandatangani dokumen pengajuan remunerasi tiap bulan serta kelengkapan berkas pertanggungjawaban remunerasi - Memeriksa dan menandatangani laporan bulanan rekonsiliasi SAIBA, realisasi DIPA 01 dan DIPA 05 - Memeriksa dan menandatangani laporan keuangan semesteran dan tahunan DIPA 01 dan DIPA 05 serta sebagai KORWIL DIPA 05 - Memeriksa dan menandatangani SK tentang ijin penghunian dan penetapan sewa rumah dinas/ jabatan - Memeriksa dan menandatangani SK tentang ijin pemakaiankendaraan roda 2 dan 4 - Memeriksa dan menandatangani laporan BMN semesteran dan tahunan DIPA 01 dan DIPA 05 serta sebagai KORWIL DIPA 05

			<ul style="list-style-type: none"> - Menandatangani perpanjangan pajak kendaraan, daftar inventaris ruangan dan kartu inventaris barang setiap tahun - Memeriksa dan menandatangani surat perjanjian dengan honorer dan jadwal piket khusus hari sabtu dan minggu - Menilai SKP Kasubbag umum dan Keuangan serta menandatangani SKP Staf
		7	<p>Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinir penyusunan rencana kerja anggaran kementerian/lembaga, LKJIP dan laporan Tahunan - Mengkoordinir penyusunan rencana kerja tahunan serta data kebutuhan ATK dan pemeliharaan sarana/prasarana kantor - Memonitor dan mengawasi pengelolaan website kantor, server dan sarana teknologi informasi serta aplikasi SIPP - Mengkoordinir penyusunan SOP subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan - Meneliti dan menandatangani laporan triwulan berdasarkan PP No. 39 tahun 2006 - Membuat konsep surat pengantar usulan revisi anggaran ke Kanwil DJPB

			<p>setempat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menilai SKP Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengkonsep dan memaraf surat keluar sesuai dengan disposisi surat yang diberikan 3. Membuat program kerja tahunan dan uraian tugas di Kesekretariatan pada Tahun berjalan. 4. Menginput rencana umum pengadaan tahun berjalan sebagai admin aplikasi SIRUP 5. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran 6. Mengikuti kegiatan sosialisasi dari KPPN Kanwil DJPB Prov. Kalteng
2	<p>KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA</p>	33	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun SKP Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana 2. Memproses usulan kenaikan pangkat 3. Mengerjakan KGB 4. Menyusun bezzeting pegawai 5. Menyusun DUK 6. Menyusun DUS 7. Mengerjakan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan 8. Mengerjakan pelantikan hakim/pejabat 9. Mengerjakan surat pernyataan telah melaksanakan tugas 10. Mengerjakan surat pernyataan telah menduduki jabatan 11. Mengerjakan surat pernyataan

			<p>pelantikan</p> <p>12. Mengerjakan surat keterangan pembayaran tunjangan keluarga (KP4)</p> <p>13. Mengerjakan surat tugas kedinasan</p> <p>14. Mengerjakan surat keterangan perjalanan dinas</p> <p>15. Membuat surat pelaksana tugas (Plt)</p> <p>16. Membuat surat pelaksana harian (Plh)</p> <p>17. Membuat dan memproses surat cuti pegawai/hakim</p> <p>18. Mempersiapkan absensi pegawai/hakim setiap hari kerja</p> <p>19. Merekap absensi bulanan pegawai untuk remunerasi</p> <p>20. Merekap absensi bulanan pegawai/hakim untuk uang makan</p> <p>21. Membuat surat usulan KARIS/KARSU, Taspen, BPJS dll</p> <p>22. Membuat surat usulan diklat hakim dan pegawai</p> <p>23. Memproses surat usulan jabatan</p> <p>24. Memproses surat mutasi pegawai</p> <p>25. Memproses usulan pensiun hakim/pegawai</p> <p>26. Membuat konsep surat keputusan intern</p> <p>27. Menata file arsip surat keluar/surat masuk di subbag kepegawaian, organisasi dan tata laksana</p> <p>28. Membuat laporan kegiatan bulanan kepada hakim pengawas bid.</p>
--	--	--	---

			<p>Kepegawaian</p> <p>29. Menata file arsip kepegawaian</p> <p>30. Membuat struktur organisasi</p> <p>31. Membuat daftar riwayat pekerjaan untuk syarat kenaikan pangkat</p> <p>32. Membuat berita acara pelantikan</p> <p>33. Membuat susunan acara pelantikan</p>
3	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	16	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan revisi anggaran DIPA tahun berjalan 2. Laporan keuangan 3. Penggunaan, menatausahakan dan pemeliharaan BMN 4. Mengkonsep dan memaraf surat keluar sesuai dengan disposisi surat yang diberikan 5. Membuat program kerja tahunan dan uraian tugas di subbag umum dan keuangan pada tahun berjalan 6. Membuat penilaian kinerja terhadap bawahan khusus di subbag umum dan keuangan 7. Memeriksa dan mengoreksi serta mengunci dokumen pengajuan remunerasi setiap bulannya pada aplikasi KOMDANAS 8. Memaraf dan meneliti kelengkapan berkas pertanggungjawaban remunerasi setiap bulannya pada aplikasi KOMDANAS 9. Memaraf dan meneliti kelengkapan berkas pertanggungjawaban

			<p>remunerasi yang akan dikirim ke PTTUN Jakarta dan Biro Keuangan MA RI</p> <p>10. Menginput rencana umum pengadaan tahun berjalan</p> <p>11. Mengajukan rencana kebutuhan ATK dan keperluan subbag umum dan keuangan</p> <p>12. Mengikuti kegiatan sosialisasi dari KPPN dan Kanwil DJPB Prov. Kalteng</p> <p>13. Membuat, memeriksa, mengoreksi dan menandatangani laporan bulanan DIPA 01 dan DIPA 05</p> <p>14. Menyusun jadwal piket khusus jam istirahat setiap bulan</p> <p>15. Membuat dan menyusun uraian tugas tenaga kontrak (honorar) pada PTUN Palangka Raya setiap awal bulan</p> <p>16. Memperbaharui matrik SOP subbag Umum dan Keuangan setiap tahun anggaran</p>
4	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN	16	<p>1. Menyusun SKP Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan</p> <p>2. Membuat Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga</p> <p>3. Menghimpun data kebutuhan ATK dan sarana penunjang kerja</p> <p>4. Menyusun Rencana Kerja Tahunan yang berhubungan dengan sarana prasarana</p> <p>5. Menerima dan Menandatangani surat</p>

			<p>masuk-surat keluar di Bagian IT</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Memonitor dan mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi melalui aplikasi SIPP 7. Memonitor dan mengawasi pengelolaan website kantor 8. Memonitor dan mengawasi pengelolaan server dan lain-lain 9. Memonitor dan mengawasi pelaksanaan aplikasi Direktori Putusan 10. Melaporkan kegiatan dalam laporan bulanan (triwulan) pd Hakim Pengawas Bidang 11. Mengawasi pelaksanaan maintenance hardware dan hal-hal yang dianggap perlu 12. Membuat Laporan Triwulan berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006 13. Membuat Laporan Tahunan 14. Membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 15. Membuat program kerja subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan 16. Membuat dan Menyusun SOP subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
--	--	--	---

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

- AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

Berdasarkan Serifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : TAPM.13-TUN/QMR/SERTIFIKAT/9/2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah berstatus akreditasi dengan **nilai C (CUKUP)**. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ini diberikan setelah dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan 03 Agustus 2018 dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direkrorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 06 September 2018.



- **POSBAKUM (SATKER YANG MENDAPAT ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN)**

Didalam DIPA Dirjen Badilmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2018 Tahun Anggaran 2018 pagu anggaran untuk Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 35.800.000,- selama 1 Tahun melalui Kegiatan Pos Bantuan Hukum untuk ATK Posyankum dan Jasa Konsultan Hukum.

Realisasi anggaran ini sebesar **Rp. 28.900.000,-** atau **80,73%** dari pagu DIPA, hal ini disebabkan karena tidak ada perkara prodeo yang masuk sehingga dana yang ada tidak dapat digunakan untuk keperluan ATK Hukum dan Konsumsi Persidangan.

. Untuk Jasa Konsultan Hukum menggunakan Jasa Peradi sebagai Konsultan Hukum pada kegiatan Pos Bantuan Hukum.

- **SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU**

- **PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)**

Didalam DIPA Tahun Anggaran 2018 pagu anggaran untuk Perkara Prodeo sebesar Rp. 500.000,- untuk 1 Perkara melalui Kegiatan Penyelesaian Perkara Prodeo untuk Biaya Perkara Prodeo. Realisasi anggaran ini sebesar Rp. 0,- atau 0% dari pagu. Hal ini dikarenakan tidak adanya perkara prodeo yang didaftarkan sehingga anggaran yang ada tidak dipakai.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

Pembinaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya langsung dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Panitera dan Sekretaris dengan mengadakan Rapat yang dilaksanakan setiap awal bulan baik bidang kesekretariatan maupun bidang kepaniteraan.

A. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

a. Ketua, Wakil Ketua, Hakim :

- Ketua 1 orang
- Wakil Ketua 1 orang
- Hakim 6 orang

b. Pejabat Kepaniteraan :

- Panitera 1 orang
- Panitera Muda Perkara 1 orang
- Panitera Muda Hukum 1 orang
- Panitera Pengganti 3 orang
- Jurusita Pengganti 1 orang

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

a. Pejabat Struktural :

- Sekretaris 1 orang
- Kasub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 1 orang
- Kasub Bagian Umum dan Keuangan 1 orang
- Kasub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 1 orang

b. Staf :

- Panitera Muda Hukum 1 orang

c. CAKIM/CPNS 1 orang

d. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (tenaga honorer) :

- Petugas Satpam 4 orang
- Pengemudi 2 orang
- Pramubakti 4 orang

Jumlah pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri dari Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial sebanyak 15 (empat belas) Orang, Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial sebanyak 5 (enam) Orang dan Cakim/CPNS sebanyak 1 (satu) orang dengan rincian pangkat /golongan ruang sebagai berikut :

1. Teknis Yudisial ada 15 (lima belas) orang :

- Golongan Pembina Utama Madya (IV/d) 1 orang
- Golongan Pembina Utama Muda (IV/c) 0 orang
- Golongan Pembina Tk. I (IV/b) 2 orang
- Golongan Pembina (IV/a) 0 orang
- Golongan Penata Tk. I (III/d) 4 orang
- Golongan Penata (III/c) 6 orang
- Golongan Penata Muda Tk. I (III/b) 2 orang
- Golongan Penata Muda (III/a) 0 orang

2. Non Teknis Yudisial ada 6 (enam) orang :

- Golongan Pembina (IV/a) 1 orang
- Golongan Penata Tk. I (III/d) 2 orang
- Golongan Penata (III/c) 1 orang
- Golongan Penata Muda Tk. I (III/b) 1 orang
- Golongan Penata Muda (III/a) 1 orang
- Golongan Pengatur Muda Tk. I (II/b) 0 orang

- **Rekrutmen**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak pernah menyelenggarakan rekrutmen penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Untuk menutupi kekurangan pegawai, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya memperkerjakan tenaga honorer sebanyak 10 (sepuluh) orang yang pembiayaannya bersumber dari DIPA.

- **Mutasi**

Mutasi yang terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya selama Tahun 2018 diantara lain :

Mutasi Keluar

• **BOBY CAHYADI, S.H**

Berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor : 271/Djmt/KEP/05/2018 Tanggal 25 Mei 2018 alih tugas dari jabatan lama Panitera Pengganti PTUN Palangka Raya menjadi Panitera Muda Hukum PTUN Jayapura.

- **Usul Mutasi**

◆ Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Tahun 2018 melakukan usulan Mutasi berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/513/KP.04.12/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 dan Nomor : W2-TUN6/942/KP.04.12/XI/2018 tanggal 28 Nopember 2018 perihal Usul Mutasi sebagai Panitera PTUN Banjarmasin
a.n. YUSRAN IBERAHIM, S.H.

◆ Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Tahun 2018 melakukan usulan jabatan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/791/KP.04.12/IX/2018 tanggal 25 September 2018 perihal Permohonan Pindah Tugas menjadi Panitera

Pengganti ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara **a.n. PATAR SIPAHUTAR, S.H.**

- **Promosi Jabatan**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Tahun 2018 melakukan usulan promosi jabatan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/466/KP.04.12/V/2018 tanggal 07 Mei 2018 perihal Permohonan Persetujuan/Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Jusita Pengganti pada PTUN Palangka Raya **a.n. HERNADI NATANAEL, S.H**

Dan atas usulan promosi jabatan tersebut maka berdasarkan **Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor : 1066/DjMT/B/09/2018 tanggal 5 September 2018** Perihal Permohonan Izin Pengangkatan dalam Jabatan Teknis (Pindah dari Pegawai Non Teknis menjadi Pegawai Teknis.

Pelantikan

- Berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor : 637/Djmt/SK/KEP/11/2017 tanggal 26 Nopember 2018 atas nama :

- **EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H**

Dilantik dari jabatan lama Hakim PTUN Surabaya ke jabatan baru sebagai Wakil Ketua PTUN Palangka Raya

Yang dilantik oleh Ketua PTUN Palangka Raya pada tanggal 05 Januari 2018.

- Berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor : 567/Djmt/KEP/09/2018 tanggal 26 September 2018 atas nama :

- **HERNADI NATANAEL, S.H**

Dilantik dari jabatan lama Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan ke jabatan baru sebagai Jusita Pengganti PTUN Palangka Raya

Yang dilantik oleh Ketua PTUN Palangka Raya pada tanggal 26 Nopember 2018

- **PENSIUN**

Dalam Tahun 2018 pengajuan usulan pensiun duda suami dari almarhumah **DEVI HARTATI, S.H** yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan surat Nomor : W2-TUN/ 895 /KP.05.02/XI/2018 perihal Usul Penerbitan SK Pensiun Duda tanggal 5 Nopember 2018

- **DIKLAT TEKNIS/NON TEKNIS**

Pada Tahun 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah mengikut sertakan sumber daya manusia yang ada didalamnya untuk mengikuti berbagai kegiatan diklat dan bimbingan teknis diantaranya sebagai berikut :

- Bimbingan Teknis Administrasi dan Pelayanan Peradilan bagi Para Panitera dan Bendahara Keuangan Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia dengan tema (a.n **YUSRAN IBERAHIM, S.H dan ADITYA APRIZA, S.H**)
- Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara Versi 3.2.0 di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia (a.n **WIWIK KRISNAWATI, S.Kom dan ABDUL RAHMAN**)
- Bimbingan Teknis Hakim Pengadilan TUN 2018 dengan tema “ Pengenaan Sanksi Administarsi Oleh Pejabat Berwenang Terhadap Pejabat Pemerintahan yang Tidak Melaksanakan Putusan PTUN yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (a.n **SETYOBUDI, SH., MH**)
- Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Khusus Pemilu Bagi Hakim Pengadilan TUN seluruh Indonesia dengan peserta sejumlah 40 (empat puluh) orang (a.n **FENI ENGGARWATI, SH**)
- Bimbingan Teknis Ketatalaksanaan Perkara TUN dengan peserta Panmud Perkara Peradilan TUN Seluruh Indonesia dan Bagian Pemberkasan pada Pengadilan Pajak Jakarta (a.n **PATAR SIPAHUTAR, SH**)
- Kegiatan Pendalaman Materi Sengketa Administrasi Fiktif Positif Lingkungan Peradilan TUN seluruh Indonesia (a.n **RACMAN HAKIM BUDI SULISTYO, SH., M.Kn**)
- Bimbingan Teknis Penganggaran Kementrian/Lembaga (Bintek K/L) TA 2018 (A.n. **HERU PAMUNGKAS, S.T**)
- Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Tk. III angkatan XII-XIII Wilayah Jakarta (A.n. **HERU PAMUNGKAS, S.T**)

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Sisa perkara tahun 2017, perkara yang masuk, Putus dan dicabut pada tahun 2018 (*terlampir*)
 - a. Sisa perkara tahun 2017 berjumlah 15 Perkara

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL MASUK	PENGGUGAT PEMOHON	TERGUGAT TERMOHON
01.	24/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	14-08-2017	NONONG EKA CHANDRA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR
02.	28/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	18-10-2017	H O L D I, ST	BUPATI KAPUAS
03.	29/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	19-10-2017	WAHYUNI	1. BUPATI KAPUAS; 2. SARIYANTO
04.	30/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	23-10-2017	HARDY RAMPAY	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
05.	31/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	31-10-2017	FRISBOY	BUPATI BARITO TIMUR;
06.	32/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	02-11-2017	I M A N	BUPATI KAPUAS
07.	33/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	06-11-2017	ASNAN	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
08.	34/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	06-11-2017	- H. M. YAHYA - F A U J I	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

09.	35/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	06-11-2017	MIHELDY	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
10.	36/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	06-11-2017	YERICHO ABEL	1. BUPATI KAPUAS 2. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DADAHUP, KECAMATAN DADAHUP, KAB. KAPUAS
11.	37/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	13-11-2017	1. P U J A R I 2. DEDE SAFARI	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
12.	39/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	22-11-2017	DJAUW HOI MIN Alias HENDRA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
13.	40/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	30-11-2017	JONI SURYANATA	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BAAMPAH KECAMATAN MENTAYA HULU, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
14.	41/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	08-12-2017	WIYOTO, SH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS
15.	42/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	20-12-2017	T O P A N, S.Pd	BUPATI KAPUAS

b. Perkara masuk tahun 2018 berjumlah 29 Perkara

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL MASUK	PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT/TERMOHON
1	1/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	05-01-2018	Ir. SILAS, ST	SEKRETARIS DAERAH KAB. BARITO SELATAN
<u>2</u>	<u>1/P//FP/2018/PTUN.PLK</u> (LAIN-LAIN)	<u>16-01-2018</u>	<u>IMAN WILLIYAN</u> <u>LANGKAH BAHAN, ST</u>	<u>KEPALA DINAS</u> <u>PERDAGANGAN DAN</u> <u>PERINDUSTRIANN</u> <u>PROVINSI KALIMANTAN</u> <u>TENGAH</u>
3	2/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	30-01-2018	SYSWANSYAH, A.Md	BUPATI SERUYAN
4	3/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	30-01-2018	TAUFIK RAHMAN, ST	BUPATI SERUYAN
5	4/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	30-01-2018	EKO PURWANTO, ST	BUPATI SERUYAN
6	<u>5/G/KI/2018/PTUN.PLK</u> (KOMISI INFORMASI)	<u>05-02-2018</u>	<u>KEPALA KANTOR</u> <u>PERTANAHAN</u> <u>PALANGKA RAYA</u>	<u>MEYIWATI</u>
7	6/G/2018/PTUN.PLK (LELANG)	26-02-2018	PT. KARYA ANUGRAH PERSADA	KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
8	7/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	26-02-2018	SALUNDIK, SH.,MH	KETUA YAYASAN TAMBUN BUNGAI PALANGKA RAYA
9	8/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	12-03-2018	MUHAJIRIN, SP	BUPATI SERUYAN
10	9/G/2018/PTUN.PLK (PERIJINAN)	22-03-2018	HAMSI	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS
11	10/G/2018/PTUN.PLK (PERIJINAN)	27-03-2018	1. YUNARIS; 2. SENADI	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS
<u>12</u>	<u>2/P//PW/2018/PTUN.PLK</u> (WEWENANG)	<u>18-04-2018</u>	<u>Ir. SILAS, ST</u>	

13	11/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	30-04-2018	YUDI PUNGAN, SE.,MS	KETUA DAN SEKRETARIS YAYASAN PENDIDIKAN ALUMNI SARJANA EKONOMI INDONESIA PALANGKA RAYA(YP-SEI PR)
14	12/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	04-06-2018	ANDRE ANTONONI, ST.,MT	REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
15	13/G/2018/PTUN.PLK (LELANG)	04-06-2018	PT. KARYA ANUGRAH PERSADA	KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG / JASA 02 UNIT LAYANAN PELELANGAN (ULP) MUARA TEWEH, KAB. BARITO UTARA
16	14/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	03-07-2018	TOTO HARTONO, SH.,MP	BUPATI BARITO SELATAN
17	15/G/2018/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	04-07-2018	DJOKO SUMANTRI, SE	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
18	16/G/2018/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	16-07-2018	1. ANA JATMO 2. BUDIYANTO 3. EDYSON 4. DARSONO	KEPALA BPN/TATA RUANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
19	17/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	17-07-2018	SUPENDI BIN HINTING	KEPALA DESA KABUAN
20	18/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	23-08-2018	BUDIANTO, SH	BUPATI KATINGAN
21	<u>3/P//FP/2018/PTUN.PLK</u> <u>(PERIJINAN)</u>	<u>28-08-2018</u>	<u>PT. PRIMA BARA</u> <u>INDONESIA</u>	<u>GUBERNUR KALIMANTAN</u> <u>TENGAH</u>
22	19/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	10-09-2018	Ir. SADAR ARDI	WALIKOTA PALANGKA RAYA
23	20/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	19-09-2018	MULIADI, S.Pd	KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
24	21/G/2018/PTUN.PLK (PARTAI POLITIK)	10-10-2018	H. AMIR MAHMUD, SE.,MM	GUBERNUR KALIMANTAN TENTAH
25	22/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	19-10-2018	KARYADI, SE	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
26	23/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	25-10-2018	RIADI JUNIANNUR	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

27	24/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	7-12-2018	Ir. BONAPARTEI, M.Sc	GUBERNUR KALIMANTAN TENTAH
28	<u>25/G/KI/2018/PTUN.PLK</u> (KOMISI INFORMASI)	<u>12-12-2018</u>	<u>KEPALA KANTOR</u> <u>WILAYAH BADAN</u> <u>PERTANAHAN</u> <u>NASIONAL PROVINSI</u> <u>KALIMANTAN TENGAH</u>	<u>MUHAMMAD HABIBI</u>
29	26/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	21-12-2018	LIEM WAN HING, ST	GUBERNUR KALIMANTAN TENTAH

c. Perkara putus tahun 2018 berjumlah 31 Perkara

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL PUTUS	PENGGUGAT PEMOHON	TERGUGAT TERMOHON
01.	24/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	24-01-2018	NONONG EKA CHANDRA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR
02.	28/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	08-02-2018	H O L D I, ST	BUPATI KAPUAS
03	31/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	08-02-2018	FRISBOY	BUPATI BARITO TIMUR
<u>04</u>	<u>1/P//FP/2018/PTUN.PLK</u> (LAIN-LAIN)	<u>13-02-2018</u>	<u>IMAN WILLIYAN</u> <u>LANGKAH BAHAN, ST</u>	<u>KEPALA DINAS</u> <u>PERDAGANGAN DAN</u> <u>PERINDUSTRIANN</u> <u>PROVINSI KALIMANTAN</u> <u>TENGAH</u>
05	29/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	20-02-2018	WAHYUNI	1. BUPATI KAPUAS; 2. SARIYANTO
06	30/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	20-02-2018	HARDY RAMPAY	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
07	36/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	01-03-2018	YERICHO ABEL	1. BUPATI KAPUAS 2. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DADAHUP, KECAMATAN
08	32/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	06-03-2018	IMAN	BU PATI KAPUAS

09	42/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	09-04-2018	T O P A N, S.Pd	BU PATI KAPUAS
10	39/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	10-04-2018	DJAUW HOI MIN Alias HENDRA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
11	41/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	10-04-2018	WIYOTO, SH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS
12	33/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	11-04-2018	A S N A N	BU PATI KOTAWARINGIN TIMUR
13	34/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	11-04-2018	- H. M. YAHYA - FAUJI	BU PATI KOTAWARINGIN TIMUR
14	35/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	11-04-2018	MIHELDY	BU PATI KOTAWARINGIN TIMUR
15	1/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	12-04-2018	Ir. SILAS, ST	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
16	<u>5/G/KI/2018/PTUN.PLK</u> <u>(KOMISI INFORMASI)</u>	<u>12-04-2018</u>	<u>KEPALA KANTOR</u> <u>PERTANAHAN KOTA</u> <u>PALANGKA RAYA</u>	<u>MEYIWATI</u>
17	37/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	18-04-2018	- PUJARI - DEDE SAFARI	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
18	2/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	02-05-2018	SYSWANSYAH, A.Md	BUPATI SERUYAN
19	3/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	02-05-2018	TAUFIK RAHMAN, ST	BUPATI SERUYAN
20	4/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	02-05-2018	EKO PURWANTO, ST	BUPATI SERUYAN
21	40/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	03-05-2018	JONI SURYANATA	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BAAMPAH KECAMATAN MENTAYA HULU, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
<u>22</u>	<u>2/P//PW/2018/PTUN.PLK</u> <u>(LAIN-LAIN)</u>	<u>17-05-2018</u>	<u>Ir. SILAS, ST</u>	

23	6/G/2018/PTUN.PLK (LELANG)	07-06-2018	PT. KARYA ANUGRAH PERSADA	KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
24	8/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	26-06-2018	MUHAJIRIN, SP	BUPATI SERUYAN
25	7/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	05-07-2018	SALUNDIK, SH.,MH	KETUA YAYASAN TAMBUN BUNGA PALANGKA RAYA
26	11/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	16-08-2018	YUDI PUNGAN, SE.,MS	KETUA DAN SEKRETARIS YAYASAN PENDIDIKAN ALUMNI SARJANA EKONOMI INDONESIA PALANGKA RAYA (YP-SEI PR)
27	12/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	29-08-2018	ANDRE ANTONONI, ST.,MT	REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
28	<u>3/P//FP/2018/PTUN.PLK</u> <u>(PERIJINAN)</u>	<u>21-09-2018</u>	<u>PT. PRIMA BARA</u> <u>INDONESIA</u>	<u>GUBERNUR KALIMANTAN</u> <u>TENGAH</u>
29	14/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	11-10-2018	TOTO HARTONO, SH.,MP	BUPATI BARITO SELATAN
30	15/G/2018/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	21-11-2018	DJOKO SUMANTRI, SE	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
31	16/G/2018/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	5-12-2018	1. ANA JATMO 2. UDIYANTO 3. EDYSON 4. DARSONO	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

d. Perkara yang dicabut tahun 2018 berjumlah 7 Perkara.

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL DICABUT	PENGGUGAT PEMOHON	TERGUGAT TERMOHON
1	10/G/2018/PTUN.PLK (PERIJINAN)	11-04-2018	1. YUNARIS 2. SENADI	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS
2	9/G/2018/PTUN.PLK (PERIJINAN)	23-04-2018	HAMSI	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS
3	13/G/2018/PTUN.PLK (LELANG)	17-07-2018	PT. KARYA ANUGRAH PERSADA	KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAN BARANG/JASA 02 UNIT LAYANAN PELELANGAN (ULP) DI MUARA TEWEH KABUPATEN BARITO UTARA
4	17/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	20-07-2018	SUPENDI BIN HINTING	KEPALA DESA KABUAN
5	18/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	06-09-2018	BUDIANTO, SH	BUPATI KATINGAN
6	19/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	16-10-2018	Ir. SADAR ARDI	WALIKOTA PALANGKA RAYA
7	26/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	27-12-2018	LIEM WAN HING, ST	GUBERNUR KALIMANTAN TENTAH

e. Sisa Perkara yang belum diminutasi berjumlah 5 perkara.

2. Perkara Banding Tahun 2018.

Pada tahun 2018 banding yang diajukan oleh para pihak di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berjumlah 19 Perkara ; Perkara Banding yang putus 23 Perkara ; Perkara Banding yang dicabut Nihil.

Perkara Banding yang diajukan pada Tahun 2018

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJUAN BANDING	PEMBANDING	TERBANDING
01.	24/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN) NONONG EKA CHANDRA MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR	06-02-2018	NONONG EKA CHANDRA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR
02	31/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN) FRISBOY MELAWAN BUPATI BARITO TIMUR	20-02-2018	BUPATI BARITO TIMUR	FRISBOY
03	29/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN) WAHYUNI MELAWAN 1. BUPATI KAPUAS 2. SARIYANTO	02-03-2018	WAHYUNI	1. BUPATI KAPUAS; 2. SARIYANTO
04	32/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN) I M A N MELAWAN BUPATI KAPUAS	12-03-2018	BUPATI KAPUAS	I M A N
05	36/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN) YERICHO ABEL MELAWAN BUPATI KAPUAS	12-03-2018	BUPATI KAPUAS	YERICHO ABEL
06	39/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN) DJAUW HOI MIN Alias HENDRA	12-04-2018 dan 23-04-2018	- T.II.INTERVENSI; - KEPALA KANTOR	DJAUW HOI MIN Alias HENDRA

	<u>MELAWAN</u> - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR - T.II. INTERVENSI		PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURI	
07	42/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN) TOPAN, S.Pd <u>MELAWAN</u> BUPATI KAPUAS	17-04-2018	TOPAN, S.Pd	BUPATI KAPUAS
08	1/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN) Ir. SILAS, ST <u>MELAWAN</u> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	23-04-2018	Ir. SILAS, ST	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
09	41/G/2017/PTUN.PLK (PERTANAHAN) WIYOTO, SH <u>MELAWAN</u> KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS	23-04-2018	WIYOTO, SH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS
10	2/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN) SYSWANSYAH, A.Md <u>MELAWAN</u> BUPATI SERUYAN	08-05-2018	BUPATI SERUYAN	SYSWANSYAH, A.Md
11	3/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN) TAUFIK RAHMAN, ST <u>MELAWAN</u> BUPATI SERUYAN	08-05-2018	BUPATI SERUYAN	TAUFIK RAHMAN, ST
12	4/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN) EKO PURWANTO, ST <u>MELAWAN</u> BUPATI SERUYAN	08-05-2018	BUPATI SERUYAN	EKO PURWANTO, ST
<u>13</u>	<u>2/P//PW/2018/PTUN.PLK</u> <u>(LAIN-LAIN)</u>	<u>30-05-2018</u>	<u>Ir. SILAS, ST</u> <u>(PEMOHON)</u>	
14	6/G/2018/PTUN.PLK (LELANG) PT. KARYA ANUGRAH PERSADA <u>MELAWAN</u> KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI	21-06-2018	PT. KARYA ANUGRAH PERSADA	KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

	KALIMANTAN TENGAH			
15	7/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN) SALUNDIK, SH.,MH MELAWAN KETUA YAYASAN TAMBUN BUNGAI PALANGKA RAYA	09-07-2018	KETUA YAYASAN TAMBUN BUNGAI PALANGKA RAYA	SALUNDIK, SH.,MH
16	11/G/2018/PTUN.PLK (LAIN-LAIN) YUDI PUNGAN, SE.,MS MELAWAN KETUA DAN SEKRETARIS YAYASAN PENDIDIKAN ALUMNI SARJANA EKONOMI INDONESIA PALANGKA RAYA (YP-SEI PR)	20-08-2018	YUDI PUNGAN, SE.,MS	KETUA DAN SEKRETARIS YAYASAN PENDIDIKAN ALUMNI SARJANA EKONOMI INDONESIA PALANGKA RAYA (YP-SEI PR)
17	14/G/2018/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN) TOTO HARTONO, SH.,MP MELAWAN BUPATI BARITO SELATAN	24-10-2018	TOTO HARTONO, SH.,MP	BUPATI BARITO SELATAN
18	15/G/2018/PTUN.PLK (PERTANAHAN) DJOKO SUMANTRI, SE MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	4-12-2018	DJOKO SUMANTRI, SE	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
19	16/G/2018/PTUN.PLK (PERTANAHAN) 1. ANA JATMO 2. UDIYANTO 3. EDYSON 4. DARSONO MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	11-12-2018	1. ANA JATMO 2. UDIYANTO 3. EDYSON 4. DARSONO	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Perkara Banding yang diputus pada Tahun 2018 sebanyak 23 Perkara.

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PUTUS	PEMBANDING	TERBANDING
1	09/G/2017/PTUN.PLK. Jo. 305/B/2017/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) Drs. DAGUT, SH.,MT <u>MELAWAN</u> GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	03-01-2018	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	Drs. DAGUT, SH.,MT
2	13/G/2017/PTUN.PLK. Jo. 326/B/2017/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) ARTIN. DKK <u>MELAWAN</u> KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	16-01-2018	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	ARTIN. DKK
3	25/G/2017/PTUN.PLK. Jo. 348/B/2017/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) ATISTO <u>MELAWAN</u> PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA LAHEI MANGKUTUP TAHUN 2017	31-01-2018	ATISTO	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA LAHEI MANGKUTUP TAHUN 2017
4	14/G/2017/PTUN.PLK. Jo. 359/B/2017/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) HAJJAH HERYATI Alias HAJJAH HERYATI MUDJIONO <u>MELAWAN</u> KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	19-02-2018	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	HAJJAH HERYATI ALIAS HAJJAH HERYATI MUDJIONO
5	21/G/2017/PTUN.PLK JO. 27/B/2018/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) INDAH MULYANI <u>MELAWAN</u> BUPATI PULANG PISAU	14-03-2018	INDAH MULYANI	BUPATI PULANG PISAU

6	17/G/2017/PTUN.PLK JO. 3/B/2018/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) RACHMADI MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	21-03-2018	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	RACHMADI
7	20/G/2017/PTUN.PLK JO. 4/B/2018/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) ABDUL HADI MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	21-03-2018	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	ABDUL HADI
8	24/G/2017/PTUN.PLK JO. 89/B/2018/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) NONONG EKA CHANDRA MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR	16-05-2018	NONONG EKA CHANDRA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR
9	31/G/2017/PTUN.PLK JO. 105/B/2018/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) FRISBOY MELAWAN BUPATI BARITO TIMUR	04-06-2018	BUPATI BARITO TIMUR	FRISBOY
10	29/G/2017/PTUN.PLK JO. 118/B/2018/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) WAHYUNI MELAWAN BUPATI KAPUAS	26-06-2018	WAHYUNI	BUPATI KAPUAS
11	32/G/2017/PTUN.PLK JO. 125/B/2018/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) IMAN MELAWAN BUPATI KAPUAS	13-07-2018	BUPATI KAPUAS	IMAN
12	<u>2/P/PW/2018/PTUN.PLK</u> <u>JO.</u> <u>167/B/PW/2018/PT.TUN.</u> <u>JKT</u>	<u>23-07-2018</u>	<u>Ir. SILAS, ST</u>	

13	1/G/2018/PTUN.PLK JO. 166/B/2018/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) Ir. SILAS, ST MELAWAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	24-07-2018	Ir. SILAS, ST	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
14	36/G/2017/PTUN.PLK JO. 126/B/2018/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) YERICHO ABEL MELAWAN BUPATI KAPUAS	13-07-2018	BUPATI KAPUAS	YERICHO ABEL
15	41/G/2017/PTUN.PLK JO. 165/B/2018/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) WIYOTO MELAWAN - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS; - KAMALA	01-08-2018	WIYOTO	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR; - KAMALA (T.II INT)
16	42/G/2017/PTUN.PLK JO. 143/B/2018/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) TOPAN, S.Pd MELAWAN 1. BUPATI KAPUAS; 2. UGAK, A.Md	01-08-2018	TOPAN, S.Pd	1. BUPATI KAPUAS; 2. UGAK, A.Md
17	39/G/2017/PTUN.PLK JO. 142/B/2018/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) DJAUW HOI MIN Alias HENDRA MELAWAN - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR - ARI YUSTIRIKA. T.II. INT	01-08-2018	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR - ARI YUSTIRIKA. T.II.INT	DJAUW HOI MIN Alias HENDRA
18	4/G/2018/PTUN.PLK JO. 188/B/2018/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) EKO PURWANTO, ST	03-09-2018	BUPATI SERUYAN	EKO PURWANTO, ST

	MELAWAN BUPATI SERUYAN			
19	2/G/2018/PTUN.PLK JO. 186/B/2018/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) SYSWANSYAH, A.Md MELAWAN BUPATI SERUYAN	17-09-2018	BUPATI SERUYAN	SYSWANSYAH, A.Md
20	3/G/2018/PTUN.PLK JO. 187/B/2018/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) TAUFIK RAHMAN, ST MELAWAN BUPATI SERUYAN	25-09-2018	BUPATI SERUYAN	TAUFIK RAHMAN, ST
21	7/G/2018/PTUN.PLK JO. 241/B/2018/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) SALUNDIK, SH.,MH MELAWAN KETUA YAYASAN TAMBUN BUNGAI PALANGKA RAYA	29-10-2018	KETUA YAYASAN TAMBUN BUNGAI PALANGKA RAYA	SALUNDIK, SH.,MH
22	6/G/2018/PTUN.PLK JO. 231/B/2018/PT.TUN.JKT (LELANG) PT. KARYA ANUGRAH PERSADA MELAWAN KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	05-11-2018	PT. KARYA ANUGRAH PERSADA	KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
23	11/G/2018/PTUN.PLK JO. 261/B/2018/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) YUDI PUNGAN, SE.,MS MELAWAN KETUA DAN SEKRETARIS YAYASAN PENDIDIKAN ALUMNI SARJANA EKONOMI INDONESIA PALANGKA RAYA (YP-SEI PR)	12-11-2018	YUDI PUNGAN, SE.,MS	KETUA DAN SEKRETARIS YAYASAN PENDIDIKAN ALUMNI SARJANA EKONOMI INDONESIA PALANGKA RAYA (YP-SEI PR)

Perkara Banding yang dicabut pada Tahun 2018 NIHIL

3. Perkara Kasasi yang diajukan pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 perkara kasasi yang diajukan berjumlah 15 perkara ; Perkara Kasasi yang putus sebanyak 11 perkara.

Perkara Kasasi yang diajukan pada Tahun 2018

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJUAN KASASI	PEMOHON KASASI	TERMOHON KASASI
1	09/G/2017/PTUN.PLK. Jo. 305/B/2017/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) Drs. DAGUT, SH.,MT MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	30-01-2018	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	Drs. DAGUT, SH.,MT
2	13/G/2017/PTUN.PLK. Jo. 326/B/2017/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) ARTIN. DKK MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	06-02-2018	ARTIN. DKK	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
3	14/G/2017/PTUN.PLK. Jo. 359/B/2017/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) HAJJAH HERYATI Alias HAJJAH HERYATI MUDJIONO MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWAIRINGI TIMUR	22-03-2018	HAJJAH HERYATI Alias HAJJAH HERYATI MUDJIONO	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR
4	17/G/2017/PTUN.PLK. Jo. 3/B/2018/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) RACHMADI MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA	23-04-2018	RACHMADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA

	PALANGKA RAYA			
5	20/G/2017/PTUN.PLK Jo. 4/B/2018/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) ABDUL HADI <u>MELAWAN</u> KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	23-04-2018	ABDUL HADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
6	<u>5/G/KI/2018/PTUN.PLK</u> <u>(KOMISI INFORMASI)</u> <u>KEPALA KANTOR</u> <u>PERTANAHAN KOTA</u> <u>PALANGKA RAYA</u> <u>MELAWAN</u> <u>MEYIWATI</u>	<u>23-04-2018</u>	<u>MEYIWATI</u>	<u>KEPALA KANTOR</u> <u>PERTANAHAN KOTA</u> <u>PALANGKA RAYA</u>
7	24/G/2017/PTUN.PLK JO. 89/B/2018/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) NONONG EKA CHANDRA <u>MELAWAN</u> KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR	07-06-2018	NONONG EKA CHANDRA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR
8	39/G/2017/PTUN.PLK JO. 142/B/2018/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) DJAUW HOI MIN Alias HENDRA <u>MELAWAN</u> KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	21-08-2018	DJAUW HOI MIN Alias HENDRA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
9	41/G/2017/PTUN.PLK JO. 165/B/2018/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) WIYOTO, SH <u>MELAWAN</u> KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS	23-08-2018	WIYOTO, SH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS
10	36/G/2017/PTUN.PLK JO. 126/B/2018/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN)	23-08-2018	YERICHO ABEL	1. BUPATI KAPUAS; 2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DADAHUP RAYA,

	YERICHO ABEL MELAWAN 1. BUPATI KAPUAS; 2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DADAHUP RAYA, KECAMATAN DADAHUP, KAB. KAPUAS			KECAMATAN DADAHUP, KAB. KAPUAS
11	4/G/2018/PTUN.PLK JO. 188/B/2018/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) EKO PURWANTO, S.T MELAWAN BUPATI SERUYAN	24-09-2018	BUPATI SERUYAN	EKO PURWANTO, S.T
12	2/G/2018/PTUN.PLK JO. 186/B/2018/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) SYAWANSYAH, A.Md MELAWAN BUPATI SERUYAN	09-10-2018	BUPATI SERUYAN	SYAWANSYAH, A.Md
13	3/G/2018/PTUN.PLK JO. 187/B/2018/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) TAUFIK RAHMAN, ST MELAWAN BUPATI SERUYAN	17-10-2018	BUPATI SERUYAN	TAUFIK RAHMAN, ST
14	7/G/2018/PTUN.PLK JO. 241/B/2018/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) SALUNDIK, SH.,MH MELAWAN KETUA YAYASAN TAMBUN BUNGAI PALANGKA RAYA	14-11-2018	SALUNDIK, SH.,MH	KETUA YAYASAN TAMBUN BUNGAI PALANGKA RAYA
15	11/G/2018/PTUN.PLK JO. 261/B/2018/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) YUDI PUNGAN, SE.,MS MELAWAN KETUA DAN SEKRETARIS YAYASAN PENDIDIKAN ALUMNI SARJANA EKONOMI INDONESIA PALANGKA RAYA (YP-SEI PR)	26-11-2018	YUDI PUNGAN, SE.,MS	KETUA DAN SEKRETARIS YAYASAN PENDIDIKAN ALUMNI SARJANA EKONOMI INDONESIA PALANGKA RAYA (YP-SEI PR)

Perkara Kasasi yang putus pada Tahun 2018 sebanyak 11 Perkara

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PUTUS	PEMOHON KASASI	TERMOHON KASASI
1	35/G/2016/PTUN.PLK Jo. 143/B/2017/PT.TUN.JKT Jo. 61 K/TUN/2018 (PERTANAHAN) MASA'AD <u>MELAWAN</u> KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	19-02-2018	MASA'AD	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
2	01/G/2017/PTUN.PLK Jo. 144/B/2017/PT.TUN.JKT Jo. 105 K/TUN/2018 (KEPEGAWAIAN) Ir. FREE <u>MELAWAN</u> GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	06-03-2018	Ir. FREE	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
3	03/G/2017/PTUN.PLK Jo. 200/B/2017/PT.TUN.JKT Jo. 141 K/TUN/2018 (PERTANAHAN) 1. GUSTI MEGAWATI 2. ROSNAWATI <u>MELAWAN</u> 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA. 2. SYAHRUDIN EFFENDI	09-04-2018	1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA. 2. SYAHRUDIN EFFENDI	1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA. 2. SYAHRUDIN EFFENDI
4	04/G/2017/PTUN.PLK Jo. 224/B/2017/PT.TUN.JKT Jo. 177 K/TUN/2018 (PERTANAHAN) BUDHI DILAN LAMAN <u>MELAWAN</u> KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	09-04-2018	BUDHI DILAN LAMAN	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
5	11/G/2017/PTUN.PLK Jo. 229/B/2017/PT.TUN.JKT Jo. 170 K/TUN/2018 (KEPEGAWAIAN) DAHLIM BANJARNAHOR <u>MELAWAN</u> GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	09-04-2018	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	DAHLIM BANJARNAHOR

6	<u>27/G/KI/2017/PTUN.PLK</u> <u>Jo. 204 K/TUN/KI/2018</u> (LAIN-LAIN / AUDIT) <u>KEPALA PERWAKILAN</u> <u>BPKP PROV. KALTENG</u> <u>MELAWAN</u> <u>FAKHRUR RAZIE</u>	<u>02-05-2018</u>	<u>KEPALA PERWAKILAN</u> <u>BPKP PROV. KALTENG</u>	<u>FAKHRUR RAZIE</u>
7	09/G/2017/PTUN.PLK Jo. 305/B/2017/PT.TUN.JKT Jo. 316 K/TUN/2018 (KEPEGAWAIAN) Drs. DAGUT, SH <u>MELAWAN</u> GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	31-05-2018	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	Drs. DAGUT, SH.,MT
8	<u>5/G/KI/2018/PTUN.PLK</u> <u>Jo. 439 K/TUN/KI/2018</u> (KOMISI INFORMASI) <u>KEPALA KANTOR</u> <u>PERTANAHAN KOTA</u> <u>PALANGKA RAYA</u> <u>MELAWAN</u> <u>MEYIWATI</u>	<u>30-07-2018</u>	<u>MEYIWATI</u>	<u>KEPALA KANTOR</u> <u>PERTANAHAN KOTA</u> <u>PALANGKA RAYA</u>
9	17/G/2017/PTUN.PLK. Jo. 3/B/2018/PT.TUN.JKT Jo. 442 K/TUN/2018 (PERTANAHAN) RACHMADI <u>MELAWAN</u> KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	25-09-2018	RACHMADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
10	20/G/2017/PTUN.PLK. Jo. 4/B/2018/PT.TUN.JKT Jo. 443 K/TUN/2018 (PERTANAHAN) ABDUL HADI <u>MELAWAN</u> KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	25-09-2018	ABDUL HADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
11	24/G/2017/PTUN.PLK. Jo. 89/B/2018/PT.TUN.JKT Jo. 529 K/TUN/2018 (PERTANAHAN) NONONG EKA CHANDRA <u>MELAWAN</u> KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR	16-10-2018	NONONG EKA CHANDRA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR

4. Perkara Peninjauan Kembali yang diajukan pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 Perkara PK yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya 6 Perkara.

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI	PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI	TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI
1	18/G/2014/PTUN.PLK (PERIJINAN) PT. KHARISMA TAMBANG PRIMA MELAWAN 1. BUPATI BARITO TIMUR 2. PT. GUNUNG CAHAYA BERSAMA	PK KE-II 20-02-2018	PT. KHARISMA TAMBANG PRIMA	1. BUPATI BARITO TIMUR 2. PT. GUNUNG CAHAYA BERSAMA Keterangan : (PK Ke-II) Berkasnya dikembalikan oleh MARI dan kami terima tanggal 30 Mei 2018.
2	30/G/2016/PTUN.PLK Jo. 17/B/2017/PT.TUN.JKT Jo. 308 K/TUN/2017 (PERIJINAN) - PT. USAHA HANDALAN SEJAHTERA; - SARKAWI. Dkk MELAWAN BUPATI KAPUAS	30-07-2018	PT. USAHA HANDALAN SEJAHTERA;	BUPATI KAPUAS
3	03/G/2017/PTUN.PLK Jo. 200/B/2017/PT.TUN.JKT Jo. 141 K/TUN/2018 (PERTANAHAN) 1. GUSTI MEGAWATI 2. ROSNAWATI MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA; 2. SYAHRUDIN EFFENDI (T.II.INT)	15-08-2018	SYAHRUDIN EFFENDI	1. GUSTI MEGAWATI 2. ROSNAWATI
4	09/G/2017/PTUN.PLK Jo. 305/B/2017/PT.TUN.JKT Jo. 316 K/TUN/2018 (KEPEGAWAIAN) Drs. DAGUT, SH MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	28-09-2018	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	Drs. DAGUT, SH

5	11/G/2017/PTUN.PLK Jo. 229/B/2017/PT.TUN.JKT Jo. 170 K/TUN/2018 (KEPEGAWAIAN) DAHLIM BANJARNAHOR MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	03-10-2018	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	DAHLIM BANJARNAHOR
6	<u>3/P/FP/2018/PTUN.PLK</u> <u>(PERIJINAN)</u> <u>PT. PRIMA BARA</u> <u>INDONESIA</u> <u>MELAWAN</u> <u>GUBERNUR</u> <u>KALIMANTAN TENGAH</u>	<u>03-10-2018</u>	<u>GUBERNUR</u> <u>KALIMANTAN</u> <u>TENGAH</u>	<u>PT. PRIMA BARA</u> <u>INDONESIA</u>

5. Permohonan Eksekusi yang diajukan pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh para pihak di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berjumlah 5 perkara.

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJUAN EKSEKUSI	PEMOHON EKSEKUSI	TERMOHON EKSEKUSI
1	02/G/2010/PTUN.PLK (PERIJINAN) PT. GLOBAL ASIA PRIMA COALINDO MINING (GAPCO) <u>MELAWAN</u> BUPATI BARITO UTARA	24-05-2018	PT. GLOBAL ASIA PRIMA COALINDO MINING (GAPCO)	BUPATI BARITO UTARA
2	12/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN) MIRHANUDIN <u>MELAWAN</u> KEPALA DESA BANGKUANG	14-09-2018	MIRHANUDIN	KEPALA DESA BANGKUANG
3	11/G/2017/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN) DAHLIM BANJAR NAHOR, SE.,MSi <u>MELAWAN</u> GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	25-09-2018	DAHLIM BANJAR NAHOR, SE.,MSi	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

4	09/G/2017/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN) Drs. DAGUT, SH MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	23-10-2018	Drs. DAGUT, SH.,MT	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
5	31/G/2017/PTUN.PLK (LAIN-LAIN) FRISBOY MELAWAN BUPATI BARITO TIMUR	12-12-2018	FRISBOY	BUPATI BARITO TIMUR

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Dukungan sarana dan prasarana (fasilitas) yang memadai merupakan salah satu faktor pendukung pelaksana tugas di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Adapun sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan pelaksana pekerjaan antara lain adalah :

1. Sarana dan Prasarana Kantor

Pengelolaan terhadap sarana dan prasarana gedung di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terdiri dari :

- 1 buah gedung pengadilan yang berukuran luas 900 M².
- 7 buah rumah dinas Hakim yang terdiri dari : 2 buah rumah jabatan Ketua dan Wakil Ketua, dan 6 buah rumah dinas jabatan (Hakim).
- 3 buah Mobil Dinas yang terdiri dari 3 Mobil Dinas milik Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 9 buah Sepeda Motor yang semuanya milik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

a). Pengadaan.

Pada Tahun Anggaran 2018 dalam DIPA No. DIPA-005.01.2.578843/2018 Tanggal 05 Desember 2017 sampai revisi 2 terdapat pengadaan barang dan jasa yaitu :

- Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP Rp. 52.000.000;

b). Pemeliharaan.

- Gedung-Bangunan dan Halaman dan Rumah Dinas Rp. 150.749.000;
- Kendaraan Roda 4 Rp. 69.204.000;
- Kendaraan Roda 2 Rp. 32.400.000;
- Perawatan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 9.170.000;
- Langganan Daya Dan Jasa Rp. 102.900.000;

c). Penghapusan

Penghapusan untuk tahun 2018 tidak ada.

I. Daftar Inventaris Per 31 Desember 2018 Berupa :

Bangunan

Bangunan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dibangun berdasarkan DIP Nomor : 063/XIII/3/-/1995, tanggal 28 Maret 1995 Tahun Anggaran 1995/1996 dengan biaya Rp. 443.200.000,- dan dikelola sendiri oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

II. Denah bangunan / gedung disertai keterangan adalah :

- Ruang Ketua
Ukuran = $9 \times 4 = 36 \text{ M}^2$
Jumlah Hakim = 1 Orang
- Ruang Wakil Ketua
Ukuran = $9 \times 4 = 36 \text{ M}^2$.

- Jumlah Hakim = 1 Orang
- Ruang Hakim
Ukuran = $13,5 \times 6 = 81 \text{ M}^2$.
Jumlah Hakim = 5 Orang
- Ruang Panitera / Sekretaris
Ukuran = $3,5 \times 6,4 = 22,4 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = 1 Orang
- Ruang Wakil Panitera
Ukuran = $4,5 \times 5 = 22,5 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = 1 Orang
- Ruang Wakil Sekretaris
Ukuran = $4,5 \times 5 = 22,5 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = 1 Orang
- Ruang Panmud Perkara
Ukuran = $67,5 \times 6 = 40,5 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = 4 Orang
- Ruang Panmud Hukum
Ukuran = $6,75 \times 6 = 40,5 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = 3 Orang
- Ruang Kepegawaian
Ukuran = $6,75 \times 6 = 40,5 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = 1 Orang
- Ruang Umum
Ukuran = $6,75 \times 6 = 40,5 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = 3 Orang
- Ruang Keuangan
Ukuran = $5,89 \times 3,88 = 22,8 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = 3 Orang
- Tenaga Honorer

Jumlah Pegawai = 9 Orang

- Ruang Pemeriksaan Persiapan

Ukuran = 14 x 6 = 84 M².

- Ruang Sidang Utama

Ukuran = 15 x 10 = 150 M².

Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dikuasai sendiri berdasar DIP No. 063/XIII/3-/1995 tanggal 28 Maret 1995 Tahun Anggaran 1995/1996 dengan biaya seluruhnya sesuai kontrak Rp. 443.200.000,-

Bangunan Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dikuasai sendiri berdasar DIP No. 051/XIII/3-/1996 tanggal 30 Maret 1996 Tahun Anggaran 1996/1997 dengan biaya seluruhnya sesuai kontrak Rp. 206.700.000,-

Pada tahun 2004 dibangun 2 unit Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dikuasai sendiri berdasarkan DIP Nomor : 085/XIII/14-/2004 tanggal 1 Januari 2004 dengan biaya Rp. 221.464.000,- ;

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Khusus terhadap sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, berdasarkan anggaran yang tersedia dari DIPA Tahun Anggaran 2018, telah dilakukan pengadaan sebagai berikut :

a). Pengadaan

Pada Tahun Anggaran 2018 dalam DIPA No. DIPA-005.01.2.578843/2018 Tanggal 05 Desember 2017 sampai revisi 2 terdapat pengadaan barang dan jasa yaitu :

- Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi Rp. 52.000.000;
Pendukung SIPP

b). Pemeliharaan

- Gedung-Bangunan dan Halaman dan Rumah Dinas Rp. 150.749.000;

- Kendaraan Roda 4	Rp. 69.204.000;
- Kendaraan Roda 2	Rp. 32.400.000;
- Perawatan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 9.170.000;
- Langganan Daya Dan Jasa	Rp. 102.900.000;

c). Penghapusan

Penghapusan barang inventaris untuk tahun 2018 tidak ada.

D. PENGELOLAAN KEUANGAN

Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 mengacu kepada Undang-Undang RI, Peraturan Presiden RI dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 seperti :

1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
6. Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
7. DIPA BUA Tahun Anggaran 2018 No. DIPA-005.01.2.578843/2018 Tanggal 05 Desember 2017 dan DIPA Dirjenmiltun Tahun Anggaran 2018 No. DIPA-005.05.2.578844/2018 Tanggal 05 Desember 2017;
8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No : 42/PA/SK/XII/2018 Tanggal 04 Desember 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui DIPA Tahun 2018 No. No. DIPA-005.01.2.578843/2018 dan No. DIPA-005.05.2.578844/2018 Tanggal 05 Desember 2017 mempunyai 3 (Tiga) Program untuk kelancaran dalam fungsi dan sub fungsi kegiatan seperti :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (005.01.01).

Dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung terdapat kegiatan :

❖ Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066) dengan keluaran :

▪ Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah (1066.001) dengan sub keluaran :

– Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah dan Satker Baru (Non Operasional) (1066.001.051).

▪ Layanan Perkantoran (1066.994.001) dengan sub keluaran :

– Gaji dan Tunjangan (001)

▪ Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (1066.994.002) dengan sub keluaran :

– Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (005.01.02).

Dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung terdapat kegiatan :

❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071) dengan keluaran :

▪ Layanan Internal (1071.951) dengan sub keluaran :

- Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP (053) dengan sub keluaran : Pengadaa Pengolah Data dan Komunikasi Sarana Prasarana Pendukung SIPP
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (005.05.09).

Dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terdapat kegiatan :

- ❖ Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (1059) dengan keluaran :
 - Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu (1059.001) dengan sub keluaran :
 - Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pradilan TUN (051).
 - Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikam Melalui Pembebasan Biaya Perkara (1059.002) dengan sub keluaran :
 - Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Prodeo (051)
 - Pos Bantuan Hukum (1059.003) dengan sub keluaran :
 - Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (051)

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui **DIPA BUA Tahun 2018 No. DIPA-005.01.2.578843/2018 Tanggal 05 Desember 2017** dengan nilai **pagu awal Rp. 4.175.552.000,-** mengalami revisi DIPA sebanyak 2 kali, Sedangkan untuk **DIPA Dirjenmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2018 Tanggal 05 Desember 2017 dengan nilai pagu Rp. 35.800.000,-** tidak ada melakukan revisi anggaran.

Adapun perincian dari DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2018 tanggal 05 Desember 2017 sampai pada Revisi ke-2 dan DIPA Dirjen Badilmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2017 tanggal 05 Desember 2017 menurut Program, Kegiatan dan Keluaran adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (005.01.01) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 4.123.552.000.

Dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung terdapat kegiatan :

- ❖ Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066) dengan keluaran :
 - Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah (1066.001) dengan sub keluaran :
 - Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah dan Satker Baru (Non Operasional) (1066.001.051) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 122.608.000,-.
 - Layanan Perkantoran (1066.994.001) dengan sub keluaran :
 - Gaji dan Tunjangan (001) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 3.273.168.000,-
 - Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (1066.994.002) dengan sub keluaran :
 - Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 727.776.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (005.01.02).

Dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung terdapat kegiatan :

- ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071) dan Sub Kegiatan Layanan Internal (overhead) (1071.951) dengan keluaran :
 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (053) dengan pagu DIPA Rp. 52.000.000,-

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (005.05.09) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 35.800.000,- .

Dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terdapat kegiatan :

- ❖ Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (1059) dengan keluaran :
 - Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu (1059.001) dengan sub keluaran :
 - Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pradilan TUN (051) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 3.500.000,-.
 - Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara (1059.002) dengan sub keluaran :
 - Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Prodeo (051) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 500.000,-.
 - Pos Bantuan Hukum (1059.003) dengan sub keluaran :
 - Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (051) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 31.800.0000,-

Dalam mengelola keuangan negara, pembelanjaan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :

1. Belanja Pegawai = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja Pegawai seperti Gaji Pegawai, Tunjangan istri/suami, Tunjangan anak, Tunjangan Jabatan (Struktural/ Fungsional), Tunjangan Umum dan Tunjangan lainnya.
2. Belanja Barang = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja setiap bulannya untuk keperluan sehari – hari kantor seperti Belanja Keperluan Perkantoran (ATK, internet, Satpam, Sopir dan Pesuruh), Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Daya dan Jasa, Belanja Pemeliharaan Aset Bergerak dan Belanja lainnya.
3. Belanja Modal = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung, Belanja Pengadaan Meubelair, Belanja Pengadaan Alat Pengolah

Data, Belanja Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor).

Untuk Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam mengelola keuangan negara melalui 2 DIPA Tahun 2018 No. DIPA-005.01.2.578843/2018 dan No. DIPA-005.05.2.578844/2018 Tanggal 05 Desember 2017 dapat dilihat sebagaimana berikut ini :

D.1. Belanja Pegawai

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan jumlah sampai saat ini 21 Pegawai dan Hakim telah lakukan penganggaran untuk gaji, honorarium dan tunjangan dalam DIPA No. DIPA-005.01.2.578843/2018 revisi ke 2 Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.273.168.000,-. Dalam pelaksanaan DIPA selama Tahun Anggaran 2018 telah menyerap dana sebesar **Rp. 3.634.130.369,-** dan Pengembalian sebesar Rp. 176.230,- sehingga terjadi realisasi diatas anggaran sebesar Rp. 360.962.369,- atau sebesar **110,64%** dari pagu DIPA yang ada.

D.2. Belanja Barang

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya memerlukan barang habis pakai untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya telah lakukan pengusulan untuk belanja barang dalam DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2018 Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 850.384.000,-. Dalam pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya selama Tahun Anggaran 2018 telah menyerap dana DIPA BUA sebesar **Rp. 830.699.054,-** dan Pengembalian sebesar Rp. 0,- sehingga terjadi realisasi dibawah anggaran sebesar Rp. 19.684.946,- atau sebesar **97,69%** dari pagu DIPA BUA. Hal ini terjadi karena disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan sehingga mempengaruhi jumlah penyerapan pagu DIPA yang disediakan. Adapun Penyerapan belanja barang tersebut terdiri :

- Belanja Barang Operasional (5211) terserap sebesar Rp. 357.763.618,- atau 99,44% yang terdiri dari belanja :
 - Belanja Keperluan Perkantoran terserap sebesar Rp. 299.123.618,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
 - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat terserap sebesar Rp. 4.560.000,- atau 76,00% dari pagu DIPA.
 - Belanja Honor Operasional Satker sebesar Rp. 40.680.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
 - Belanja Barang Operasional Lainnya sebesar Rp. 13.400.000,- atau 95,90% dari pagu DIPA.
- Belanja Barang Persediaan (5218) terserap sebesar Rp. 39.600.000,- atau 100,00% terdiri dari belanja :
 - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi terserap sebesar Rp. 39.600.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Jasa (5221) terserap sebesar Rp. 64.309.643,- atau 96,16% terdiri dari belanja :
 - Belanja Langganan Listrik terserap sebesar Rp. 63.531.145,- atau 99,46% dari pagu DIPA.
 - Belanja Langganan Telepon terserap sebesar Rp. 778.498,- atau 25,95% dari pagu DIPA.
- Belanja Pemeliharaan (5231) terserap sebesar Rp. 261.522.975,- atau 100,00% terdiri dari belanja :
 - Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terserap sebesar Rp. 122.749.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
 - Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya terserap sebesar Rp. 28.000.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
 - Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terserap sebesar Rp. 110.773.975,- atau 100,00% dari pagu DIPA.

- Belanja Barang Non Operasional (5212) terserap sebesar Rp. 7.183.000,- atau 54,37 % dari pagu DIPA.
- Belanja Jasa (5221) terserap sebesar Rp. 400.000,- atau 8,33% dari pagu DIPA.
- Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) terserap sebesar Rp. 99.831.670,- atau 95,45% dari pagu DIPA.

Sedangkan DIPA Dirjen Badilmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2018 Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 35.800.000,-, realisasi anggaran **Rp. 28.900.000,-** atau **80,73%** dari pagu DIPA. hal ini disebabkan karena ATK Hukum dan Konsumsi Persidangan tidak ada digunakan dan penanganan perkara prodeo tidak ada karena tidak perkara prodeo yang masuk sehingga dana yang ada tidak dapat digunakan.

D.3. Belanja Modal

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya telah lakukan pengusulan sarana dan prasarana untuk belanja modal untuk menunjang tugas-tugas pokok dan fungsi dalam DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2018 Tahun Anggaran 2018 terdapat anggaran belanja modal dengan realisasi **Rp. 51.999.200,-** atau **100,00%** dari pagu DIPA.

DAFTAR REALISASI ANGGARAN 2 DIPA TAHUN 2018 PER 31 DESEMBER 2018 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi diatas/(dibawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
1.	Bel. Pegawai (01)	3.273.168.000,-	3.634.130.369,-	360.962.369,-	110,64
2.	Bel. Barang (01)	850.384.000,-	830.699.054,-	(19.684.946,-)	83,02
	Bel. Barang (05)	35.800.000,-	28.900.000,-	(6.900.000,-)	80,73
3.	Bel. Modal (01)	52.000.000,-	51.999.200,-	(800,-)	100,00
	Jumlah Belanja	4.211.352.000,-	4.545.728.623,-	334.376.623,-	107,94

**DAFTAR REALISASI PNBP 2 DIPA PER 31 DESEMBER TAHUN 2018
(dalam Rupiah)**

No.	Uraian	Target	Realisasi	Realisasi di atas/(dibawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
1.	DIPA 01	0,-	27,786,188,-	0,-	100,00
2.	DIPA 05	6.776.000,-	6.570.767,-	(205.324,-)	96,97
	Jumlah	6.776.000,-	34.356.955,-	27.580.955,-	507,04

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP

1. Perangkat keras

Untuk memperlancar tugas pokok administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan maka pemanfaatan teknologi di era keterbukaan informasi menjadi hal yang sangat penting dan mutlak adanya sarana prasarana, hal ini untuk menunjang pelayanan informasi di pengadilan lebih cepat, murah dan akurat bagi pencari keadilan. Adapun perangkat keras yang dipakai untuk menunjang teknologi informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah sebagai berikut :

- 2 unit UPS ICA CE 1200
- 1 unit UPS Kenika
- 1 Unit Printer Canon Pixma MX347
- 1 Unit Scanner Fujitsu Scan SP1130
- 1 unit Server HP ML 350
- 1 Unit Server Inspur
- 1 Unit Server Fujitsu
- 1 Unit Router D-Link
- 1 Unit Router Mikrotik RB 1100 AHX2
- 1 Unit Hub 16 Port D-Link DGS 1016D
- 1 Unit Kabel UTP

- 1 Unit Kabel UTP
- 1 Unit Wireless Access Point TP Link
- 1 Unit Software Komputer Jogja Camp
- 1 Unit Software Komputer

Adapun perangkat keras yang baru tersedia dari belanja modal tahun anggaran 2016 antara lain :

- 1 Unit Tele Conference Cam
- 1 Unit Rack Server
- 1 Unit Camera
- 1 Unit Televisi 50 Inchi untuk Meja Informasi
- 2 Unit Hardisk Eksternal
- 1 Unit UPS
- 1 Unit Printer
- 2 Unit Laptop
- 1 Unit PC

Dan perangkat keras dari belanja modal tahun anggaran 2017 antara lain :

- 1 Paket ATR (*Audio to Text Recording*)
- 1 Paket E-SKUM (*Electronic SKUM*)

2. Perangkat Lunak

Adapun perangkat Lunak yang dipakai untuk menunjang teknologi informasi adalah sebagai berikut :

- Website PTUN Palangkaraya dengan alamat [www.ptun-palangkaraya](http://www.ptun-palangkaraya.go.id) go.id
- Aplikasi SIPP Versi 3.0.5 (*selalu diperbaharui*)
- Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS versi 1.0)

Adapun isi perangkat lunak yang ada akan selalu diperbaiki sesuai dengan keperluan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Untuk Jaringan Internet, pada Tahun 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah menggunakan :

- **Optik 162401310399 kapasitas 100 mbps**
- **Speedy Indihome 162401319525 kapasitas 50 mbps** (peningkatan yang semula speedy 162413200028 dan terpasang pada bulan desember 2018)

F. REGULASI TAHUN 2018

Regulasi adalah penetapan aturan-aturan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam suatu Surat Keputusan untuk melaksanakan jalannya suatu pekerjaan lebih baik dan terukur pada suatu bidang tertentu.

Pada Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah mengeluarkan berbagai surat keputusan salah satunya sebagai berikut :

- 1) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2.TUN6/855/HK.06/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang **Penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)** . (*data terlampir*)
- 2) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2.TUN6/854/HK.06/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang **Struktur Organisasi dan Profil Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya** (*data terlampir*).



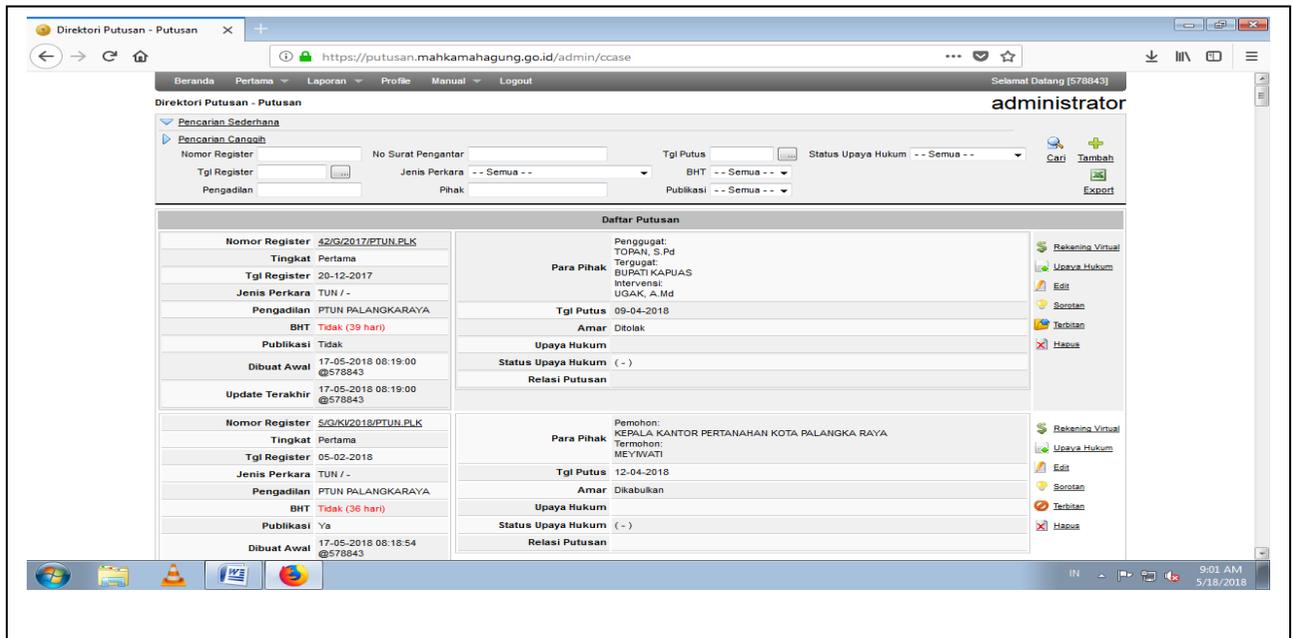
Gambar : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada PTUN Palangka Raya

- 3) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2.TUN6/35/PR.08.08/I/2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang **Penunjukan Tim Akreditasi Pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya** (*data terlampir*).
- 4) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2.TUN6/630/PW.01.10/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang **Pembentukan Tim Auditor Internal Sistem Akreditasi Penjamin Mutu di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya** (*data terlampir*).



Gambar : Foto Sertifikat Akreditasi pada PTUN Palangka Raya

- 5) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2.TUN6/527/PR.05.07/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang **Penunjukan Operator Direktori Putusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya (data terlampir).**



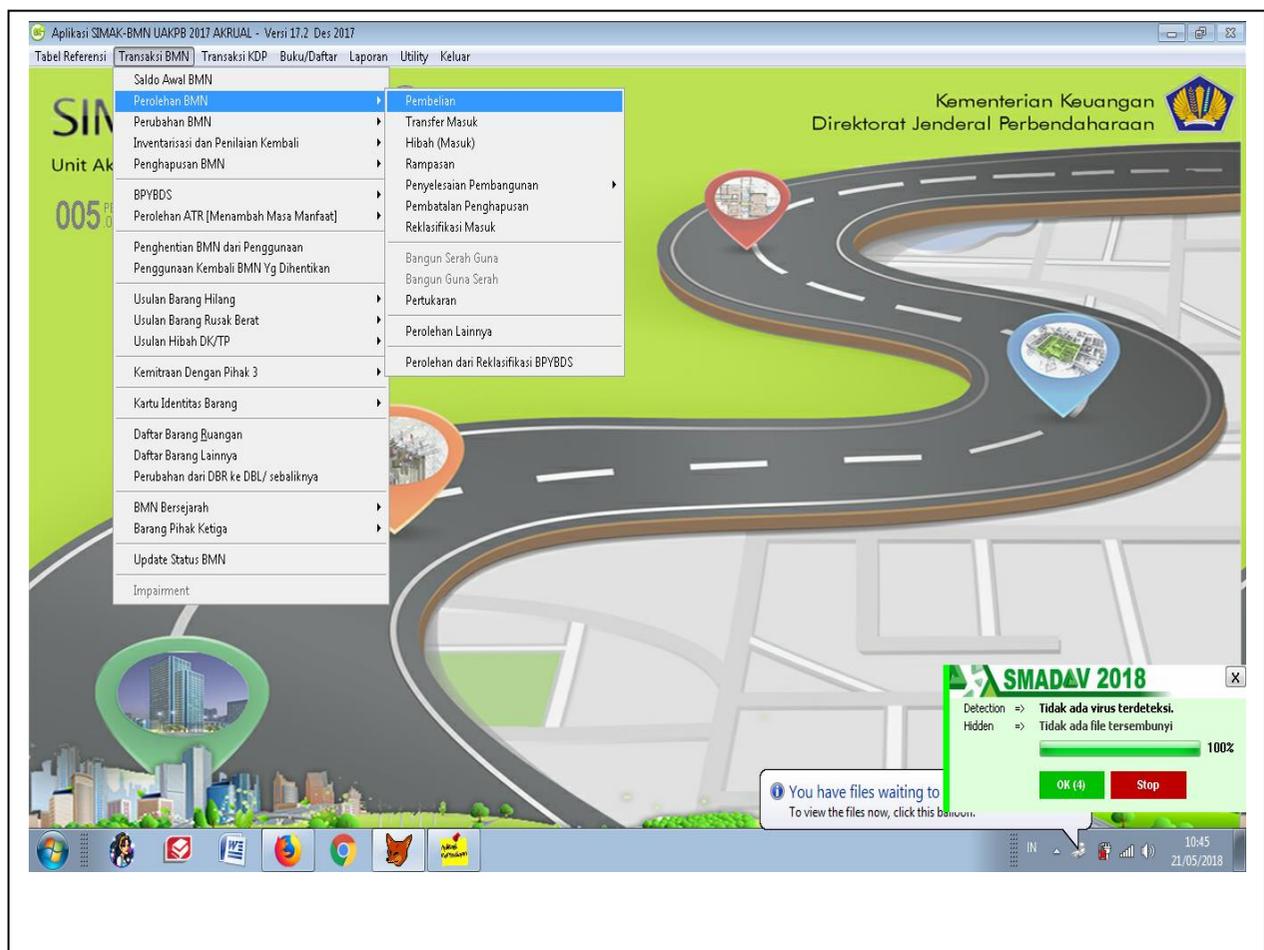
Gambar : Tampilan Aplikasi Direktori Putusan pada PTUN Palangka Raya

- 6) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2.TUN6/528/PR.05.07/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang **Penunjukan Admin dan Operator KOMDANAS (data terlampir)**
- 7)



Gambar : Tampilan Aplikasi KOMDANAS pada PTUN Palangka Raya

- 8) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2.TUN6/572/KU.05.10/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang **Penunjukan Operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya (data terlampir).**



Gambar : Tampilan Aplikasi SIMAK BMN pada PTUN Palangka Raya

BAB IV

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan internal yang dimaksud adalah Pengawasan yang dilakukan Satuan Pengawas Intern (SPI) dan Hakim Pengawas Bidang. Satuan Pengawas Intern (SPI) dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan sesuai pasal 116 Perpres no. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu Kementerian / Lembaga / Departemen/ Instansi wajib melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan Unit Layanan Pengadaan / Pejabat Pengadaan di lingkungan Kementerian / Lembaga / Departemen / Instansi masing-masing, dan menugaskan aparat pengawasan internal yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan.

Pengawasan Internal yang dilakukan adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengawasan pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh Hakim Pengawas Satuan Pengawas Intern (SPI) secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan Satuan Pengawas Intern (SPI) dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah dibentuk Hakim Pengawas Satuan Pengawas Intern (SPI) oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Surat Keputusan Nomor : **W2-TUN6/20/K/PW.03.09/I/2018** tanggal **04 Januari 2018** (*terlampir*). Sesuai dengan SK tersebut dibentuk Satuan Pengawas Intern (SPI) mempunyai tugas yaitu :

1. Melakukan pengawasan dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap pengelolaan keuangan (DIPA) Tahun Anggaran 2018 khususnya dalam pengadaan barang dan jasa (belanja modal) secara komprehensif agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku;
2. Menyusun laporan hasil pemeriksaan, baik dengan atau tanpa rekomendasi;

3. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya rutin setiap bulan;
4. Pelaksanaan Pengawasan tersebut tetap berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 Tanggal 24 Agustus 2006.

Hasil pengawasan yang dilakukan Satuan Pengawas Intern (SPI) dilaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti.

B. EVALUASI

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 mendapat 2 DIPA yaitu DIPA BUA dan DIPA Dirjen Badilmiltun. **Pada Tahun 2018 terdapat belanja modal yaitu Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (sarana prasarana pendukung SIPP) berupa Laptop sebanyak 4 (empat) Unit.**

Berdasarkan **Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya W2-TUN6/20/K/PW.03.09/II/2018 tanggal 04 Januari 2018**, Satuan Pengawas Intern (SPI) berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan/DIPA Tahun Anggaran 2018 khususnya dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Belanja Modal).

Untuk Pengawasan dalam sub-sub bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan dibentuk **Hakim Pengawas Bidang** berdasarkan **Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No. W2-TUN6/405/K/PW.03.09/IV/2018 tanggal 17 April 2018 (terlampir)**. Bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan membuat laporan bidang masing-masing setiap triwulan yang diserahkan kepada Hakim Pengawas Bidang, kemudian selanjutnya berbagai temuan akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti. Hasil pemeriksaan oleh Hakim Pengawas Bidang akan dilaporkan kepada Koordinator Pengawas Bidang yang selanjutnya Ketua Koordinator membuat laporan hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berupa rekomendasi yang nantinya berguna sebagai bahan pertimbangan pimpinan Pengadilan untuk menentukan arah kebijakan dan tindak-lanjut yang diperlukan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN :

- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir diambil dengan UU. No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Secara umum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut :
 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama.
 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara terhadap masyarakat pencari keadilan secara transparan.
 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (umum, kepegawaian dan keuangan).
- Penataan dan pengelolaan manajemen lembaga peradilan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dipercaya, responsif dan produktif, yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang agung.

B. REKOMENDASI :

- Dalam rangka Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya perlu dilakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara terus menerus, sehingga kualitas Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat melakukan tugasnya secara profesional, cakap dan terampil.
- Untuk menunjang peningkatan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya perlu penambahan sarana prasarana dalam DIPA tahun anggaran 2019.
- Adanya sistem pengawasan yang efektif dapat mencegah tindakan serta perilaku terhadap segala bentuk perbuatan tercela yang dilakukan oleh setiap warga Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sehingga perlu ditingkatkan dalam pelaksanaannya.
- **Pada Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah terakreditasi C (CUKUP)** berdasarkan Serifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : TAPM.13-TUN/QMR/SERTIFIKAT/9/2018. Diharapkan di tahun yang akan datang, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terus berupaya meningkatkan kinerjanya, memberikan pelayanan yang prima dengan dukungan sarana prasarana yang lebih baik lagi.

LAMPIRAN - LAMPIRAN